

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia terdiri dari beberapa wilayah yang memiliki struktur perekonomian yang beraneka ragam. Struktur ekonomi dapat dilihat dari peran/kontribusi dari masing-masing sektor perekonomian. Pada tahap-tahap awal pembangunan menunjukkan bahwa sektor primer memiliki peran penting dalam pembentukan pendapatan suatu wilayah/negara. Pembangunan lebih lanjut membuat peran/kontribusi sektor primer berkurang dan peran ini berpindah ke sektor sekunder dan tersier. Turunnya peran/kontribusi sektor primer di semua wilayah tidaklah berarti sektor primer di semua wilayah nilai tambahnya turun. Pada kenyataannya nilai tambahnya selalu meningkat, akan tetapi pertumbuhan nilai tambah pada sektor lainnya juga meningkat lebih tinggi. Perubahan struktur ekonomi wilayah-wilayah di Indonesia dipengaruhi oleh potensi yang dipunyai wilayah yaitu sumber-sumber yang ada. (Adi dalam Nurlatifa 2001:1)

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari asas desentralisasi, dimana penentuan kebijakan dan pertanggung jawaban pembiayaan maupun pengelolaan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah daerah menekankan pada peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Dalam pembangunan daerah, pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya - sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999: 108).

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah memerlukan berbagai macam data statistik sebagai dasar penentuan strategi dan kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan pembangunan

ekonomi yang telah diambil pada masa-masa yang lalu perlu dipantau dan dilihat hasil-hasilnya. data statistik yang merupakan ukuran kuantitatif mutlak diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu.

Namun, pembangunan tidak sekedar ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, akan tetapi lebih dari itu pembangunan mempunyai perspektif yang lebih luas. Dimensi sosial yang sering diabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi justru mendapat tempat yang strategis dalam pembangunan. Khususnya pembangunan perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara yang terkhusus daerah Bolaang Mongondow, dalam pembangunan perekonomian di daerah Bolaang Mongondow dilaksanakan dalam upaya peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan masyarakat dalam konsep mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal di masing - masing wilayah.

Perkembangan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow selang Tahun 2000 – 2011 berdasarkan indikator PDRB terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh pola pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Setelah pada tahun 2000 yang merupakan tahun kebangkitan perekonomian secara nasional yang juga dijadikan sebagai tahun dasar, pada tahun 2000 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku untuk Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar Rp. 721.78 milyar, kemudian pada tahun 2011 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku meningkat menjadi Rp. 2.24 triliun atau selama kurun waktu 11 tahun meningkat 210,95 persen. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 sebesar Rp. 721.78 milyar, dan pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 1.09 triliun atau meningkat 51,39 persen selama periode 2000-2011.

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto yang dijabarkan secara deskriptif, maka terlihat bahwa series data PDRB ADHB dan ADHK dari tahun ke tahun menunjukkan perbedaan nilai yang semakin besar. Hal ini mencerminkan

bertambah besarnya tingkat inflasi pada tingkat harga produsen dari tahun ke tahun. Jadi semakin besar perbedaan nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK, maka semakin besar pula tingkat inflasi yang terjadi.

## **B. Rumusan Masalah**

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola pengeluaran dan pemasukan daerahnya masing-masing. Dalam mengkaji perekonomian suatu wilayah, hal yang pertama perlu dilihat adalah struktur perekonomian wilayah tersebut yaitu :

1. Bagaimanakah struktur perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Adakah sektor basis yang dimiliki Kabupaten Bolaang Mongondow dibanding daerah lain yang memiliki kategori yang sama.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis struktur perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Mengidentifikasi sektor-sektor basis dan non basis yang dimiliki Kabupaten Bolaang Mongondow.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan struktur perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Dapat memberi informasi ilmiah bagi mereka yang ingin mengkaji lebih dalam bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan masalah yang di teliti.
3. Sebagai bahan masukan/referensi bagi para pengambil kebijakan di Kabupaten Bolaang Mongondow dalam upaya pengembangan perekonomian.